



ANALISIS PENERAPAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PENURUNAN TENGGES/*STUNTING*: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Rufina Bonur Tamayati Pardosi¹- Deddy Supriady Bratakusumah²

^{1,2}Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul

*Corresponding Email: rufina.bonur@gmail.com

Riwayat Artikel

Dikirim: 18-08-2024

Direvisi: 09-11-2024

Diterima: 25-12-2024

Abstract

To accelerate the reduction of stunting in Indonesia, collaborative governance involving stakeholders, as outlined in Presidential Regulation No. 72 of 2021, is essential. This study aims to explore the progress of research on collaborative governance in stunting reduction programs, examine the dynamics, processes, and models of collaborative governance, and assess the implementation of convergence actions. The research method used is a systematic literature review. A total of 19 articles met the inclusion and exclusion criteria, published between 2020-2024, covering research from the village to district levels, authored by 1-5 researchers. The findings indicate that while the dynamics and processes of collaborative governance have been effective in some areas, they remain less effective in others. Similarly, the involvement of Penta helix actors varies, with some regions engaging them effectively, while others are less optimal. The implementation of convergence actions has successfully involved Penta helix actors in some regions, but further management is needed in others. Facilitated leadership and enhanced regional capacity are required to strengthen the dynamics, processes, and Penta helix involvement in supporting the acceleration of stunting reduction.

Abstrak

Dalam rangka percepatan penurunan tengkes/stunting, Indonesia diharapkan melakukan *collaborative governance* dengan pemangku kepentingan yang telah diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perkembangan riset *collaborative governance* dalam program penurunan stunting, bagaimana dinamika, proses dan model *collaborative governance* dan bagaimana pelaksanaan aksi konvergensi. Metode penelitian yang digunakan adalah *systematic literature review*. Dari penelusuran literatur yang dilakukan didapatkan 19 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel tersebut dipublikasikan antara tahun 2020-2024 dan *scope* penelitian dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten serta penulis artikel antara 1-5 orang. Dinamika dan proses *collaborative governance* ada yang sudah berjalan dengan baik namun ada yang belum efektif, demikian juga pelibatan pentahelix ada yang sudah baik namun ada yang belum optimal. Pelaksanaan aksi konvergensi di sebagian daerah sudah melibatkan aktor pentahelix, namun di sebagian daerah lainnya masih perlu dikelola. Diperlukan kepemimpinan yang fasilitatif dan peningkatan kapasitas daerah untuk mendorong dinamika, proses *collaborative governance* dan pelibatan pentahelix untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Stunting, Indonesia*

1. PENDAHULUAN [HEADING 1]

Menurut UNICEF/WHO/World Bank Group *Joint Child Malnutrition Estimates* tahun 2023 prevalensi stunting balita Indonesia mencapai: 31% yang berarti stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat tinggi atau sangat serius. Angka ini lebih tinggi dari Hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023: 21,5% yang masih tergolong tinggi menurut standar WHO. Sejak tahun 2019, Indonesia telah melakukan Survei Status Gizi (SSGI) untuk mengetahui perkembangan prevalensi stunting, dengan hasil menunjukkan penurunan dari 27,7% pada 2019, menjadi 24,4% pada 2021, dan 21,6% pada 2022. Meski telah terjadi penurunan, angka ini masih jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Stunting tidak hanya tinggi pada balita, tetapi juga pada bayi di bawah dua tahun (baduta), yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan otak dan sistem kekebalan tubuh. Diperkirakan 20,1% anak di bawah usia dua tahun mengalami stunting (Laksono et al., 2022).

Percepatan penurunan angka stunting menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 (RPJMN, 2020). Pemerintah memperkirakan biaya penurunan stunting mencapai 2%-3% dari produk domestik bruto (PDB) (Asmara, 2023). Komitmen ini ditunjukkan melalui alokasi sumber daya yang signifikan, termasuk sekitar Rp51,9 triliun (USD3,9 miliar) untuk mengintegrasikan intervensi prioritas di berbagai sector (World Bank, 2020). Bank Dunia juga mendukung Indonesia dengan bantuan dana sekitar USD3,9 miliar per tahun pada 2021-2022 untuk mengatasi stunting, dengan rekomendasi agar Indonesia membelanjakan lebih banyak dana untuk intervensi terkait stunting dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada (World Bank, 2022).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang mencakup Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Strategi ini melibatkan 19 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gizi buruk, sanitasi yang kurang memadai, kualitas air minum yang buruk, dan praktik pemberian makan yang tidak tepat, yang melibatkan sektor kesehatan, sanitasi, pertanian, dan pendidikan (Black et al., 2013). Pemerintah juga mendorong komitmen di tingkat kabupaten untuk mengurangi stunting (Nutrition for Growth, 2023).

Strategi Nasional Pengurangan Stunting di Indonesia mencakup lima pilar. Pilar pertama adalah penguatan komitmen dan visi kepemimpinan, yang melibatkan komitmen semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga akademis, dan dunia usaha, dan media untuk mengurangi stunting (World Bank 2020; Nutrition for Growth 2023). Pilar kedua adalah peningkatan perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik gizi dan kebersihan yang baik (World Bank, 2020). Pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di tingkat nasional, regional, dan kabupaten, yang melibatkan pengintegrasian upaya penurunan stunting ke dalam kerangka kebijakan (Nutrition for Growth, 2023; World Bank, 2020). Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan yang mereka butuhkan

(Siswati et al., 2022). Pilar kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi untuk meningkatkan gizi, termasuk mempromosikan ASI eksklusif, meningkatkan praktik pemberian makanan pendamping ASI, dan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi (Palupi et al., 2022; Siswati et al., 2022).

Collaborative governance dianggap efektif dalam mengurangi stunting di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensi stunting di Indonesia tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan masalah gizi lainnya (World Bank, 2020). Studi merekomendasikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk LSM, akademisi, media dan dunia usaha, dalam upaya penurunan stunting melalui pendekatan multisektor. Pendekatan ini menekankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Namun, peran pemangku kepentingan belum optimal, sehingga perlu diperjelas agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Universitas, didukung oleh akademisi dan mahasiswa, berperan penting sebagai fasilitator dalam kajian ilmiah dan edukasi masyarakat terkait stunting (Sumanti, 2024). Pendekatan ini mengedepankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008).

Berdasarkan pemahaman di atas, dilakukan penelitian menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan riset dan mengetahui dinamika, proses, dan model *collaborative governance* serta aksi konvergensi dalam penurunan stunting di Indonesia. Dalam melakukan *systematic literature review*, perlu dilakukan pencarian literatur yang komprehensif dan terstruktur untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terkait *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Indonesia. Dari hasil pencarian literatur tersebut, dapat dilakukan analisis dan sintesis terhadap temuan-temuan yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Indonesia. Pertanyaan pertama penelitian adalah bagaimana perkembangan riset mengenai *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Indonesia? Sementara pertanyaan kedua adalah apa temuan tentang *collaborative governance* (dinamika, proses dan peran pentahelix) dalam penurunan stunting? Pertanyaan ketiga adalah bagaimana pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Menurut (WHO, 2013), stunting diukur berdasarkan tinggi/panjang badan menurut umur, di mana tinggi badan anak tidak mencapai standar yang ditetapkan (minus/- 2 Standard Deviasi) untuk usianya. Stunting dianggap sebagai masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang dan/atau seringnya terjadi infeksi (Torlesse et al. 2016). Stunting disebabkan oleh faktor multidimensional, termasuk gizi buruk, sanitasi yang tidak memadai, kualitas air minum yang buruk, dan praktik pemberian makan yang tidak tepat. Faktor-faktor ini melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, air dan sanitasi, pertanian, dan pendidikan (Black et al., 2013). Kerangka kerja konseptual WHO tentang stunting pada Anak menjelaskan bahwa stunting disebabkan oleh kombinasi yang kompleks antara variabel keluarga, lingkungan, sosial, dan budaya (Laksono et al., 2022). Penyebab stunting memiliki banyak aspek dan kompleks, yang terdiri dari nutrisi, kurangnya

pengetahuan, akses ke layanan kesehatan, kesehatan ibu, dan faktor lainnya (Woodhouse, 2021).

Di Indonesia, stunting pada anak berkaitan dengan praktik pengasuhan yang buruk, sanitasi dan pasokan air yang tidak memadai, sistem pangan, layanan kesehatan, serta infrastruktur air dan sanitasi. Anak-anak yang lahir prematur, dari masyarakat miskin di perkotaan dan khususnya pedesaan, dan anak laki-laki sangat rentan terhadap stunting (Beal et al., 2018). Stunting berdampak jangka pendek dan panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Dampak ini mencakup penurunan kemampuan kognitif, daya tahan tubuh yang rendah, produktifitas rendah, postur tubuh tidak optimal, peningkatan biaya kesehatan dan risiko terkena penyakit degeneratif di masa dewasa (WHO, 2013). Prevalensi stunting di Indonesia adalah 36,8% pada tahun 2007 dan 36,4% pada tahun 2017 (Laksono et al., 2022; Torlesse et al., 2016). Kekurangan gizi dan seringnya infeksi di awal kehidupan telah menjadi masalah yang terus berlanjut di Indonesia selama beberapa dekade (World Bank, 2022). Di Indonesia, beberapa intervensi pencegahan stunting telah dilakukan. Intervensi spesifik yang langsung mengatasi penyebab stunting meliputi asupan makanan, infeksi, status gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi (Kemenko PMK, 2022). Selain itu, intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi juga diperlukan (Kemenko PMK, 2022). Intervensi spesifik sebelum dan saat kehamilan seperti pemenuhan asupan gizi ibu dengan makanan bergizi dan suplemen zat besi, sangat penting untuk pencegahan stunting (Kemenkes RI, 2022).

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa beberapa intervensi telah berhasil menurunkan stunting pada balita, antara lain intervensi gizi, aksi konvergensi, kesehatan ibu dan anak, dan intervensi sosial dan ekonomi. Intervensi gizi, seperti promosi ASI Eksklusif, peningkatan praktik pemberian makanan pendamping ASI, dan pemberian suplemen gizi, terbukti efektif dalam menurunkan stunting pada anak balita di Indonesia (Rosha et al. 2016). Sebuah studi di kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menemukan bahwa aksi konvergensi yang melibatkan kerjasama beberapa sektor dan pemangku kepentingan efektif untuk menurunkan stunting pada balita (Gani, 2020). Peningkatan kesehatan ibu dan anak, termasuk ante natal care, imunisasi dan peningkatan pelayanan Kesehatan, juga efektif dalam menurunkan stunting (Rosha et al. 2016). Faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kurangnya edukasi, dan rendahnya praktik sanitasi dan *hygiene*, juga berkontribusi terhadap penurunan stunting (Aida, 2019; Ibrahim et al., 2015). Di Desa Winduaji, Brebes, program penanggulangan stunting yang dilakukan oleh pemerintah setempat melibatkan pembentukan tim pendamping keluarga (TPK), Rumah Desa Sehat (RDS) dan *Community Feeding Center* (CFC). Pemerintah mengupayakan efektifitas pelaksanaan program melalui pendekatan intervensi gizi terpadu, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan keluarga berisiko (Sutikno & Naufal, 2023).

3. METODE PENELITIAN

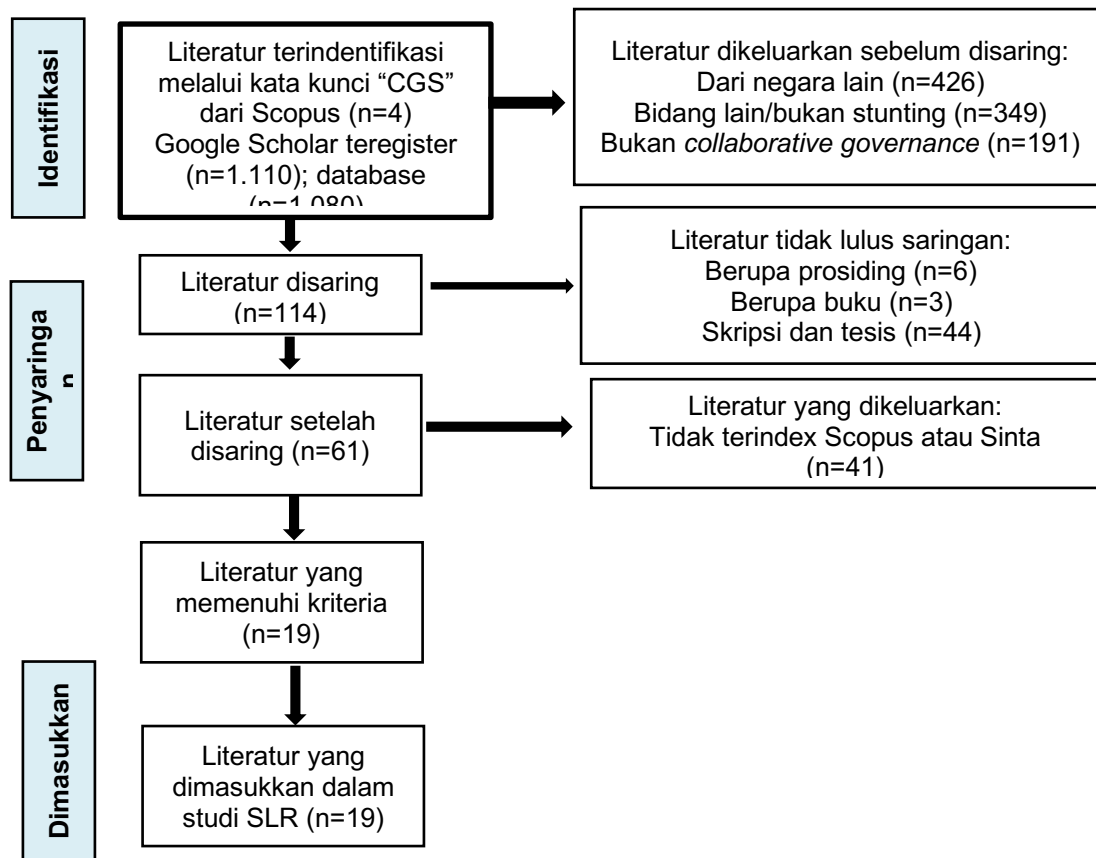
Metode penelitian yang digunakan adalah *systematic literature review (SLR)* atau kajian pustaka sistematis, sebagai metodologi, merangkum proses untuk mengumpulkan, mengatur dan menilai literatur yang ada dalam domain kajian yaitu *assembling, arranging dan assessing* (Winarno et al., 2023). SLR dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan

menginterpretasi semua literatur yang tersedia dan relevan terkait pertanyaan penelitian atau domain yang diminati (Kitchenham, 2004, 2007; Petersen et al., 2008). Alasan paling umum dalam melakukan SLR adalah: pertama, untuk menyimpulkan bukti-bukti yang sudah ada tentang topik tersebut; kedua, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada (Rizal et al. 2022).

SLR diterapkan untuk menggambarkan jenis kegiatan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. SLR menjelaskan penelitian secara umum dan memetakan penelitian daripada mengamati pertanyaan penelitian secara rinci (Petersen et al., 2008). Dengan kata lain, SLR dapat dianggap sebagai metode untuk mendapatkan deskripsi umum mengenai suatu area penelitian tertentu (Kitchenham et al., 2004) karena penelitian SLR menggali informasi secara mendalam (Brereton et al. 2007). Untuk meningkatkan akurasi dalam studi SLR, proses pencarian dan analisis harus seakurat mungkin. Oleh karena itu, bagian ini mencakup proses pemilihan sumber data, implementasi strategi untuk membuat kata kunci pencarian, dan menentukan kriteria pengecualian dan inklusi. Penelitian ini mengadopsi proses pencarian dari studi Petersen et al. (2008).

Dalam proses ini, setiap langkah memiliki hasil, dan pemetaan sistematis adalah hasil akhir dari proses pemetaan. Pada diagram 1, penulis menggambarkan proses SLR yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan dan mengikuti petunjuk dari Kitchenham (2004) dan Petersen et al. (2008). Penulis melakukan pencarian daring dari basis data elektronik terindeks Scopus. Scopus adalah database literatur yang terdiri dari abstrak dan artikel jurnal akademik internasional terkemuka yang memenuhi kriteria Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Republik Indonesia dengan kata kunci “*collaborative governance*” AND stunting dan diperoleh 4 artikel. Dikarenakan minimnya literatur terkait dalam scopus maka pencarian juga dilakukan di “*google scholar*” dengan kata kunci yang sama. Ditemukan 1.110 artikel yang teregister namun hanya 1.080 yang ada dalam database terkait Ilmu Sosial. Semua artikel menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Selanjutnya 966 artikel dikeluarkan melalui identifikasi judul dimana 426 berasal dari negara lain, 349 artikel tidak terkait dengan stunting dan 191 artikel bukan tentang *collaborative governance* sehingga diperoleh 114 artikel untuk disaring. Semua artikel sudah bersifat final dan merupakan hasil studi empiris.

Penyaringan dilakukan dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama membuang prosiding, buku, artikel tesis dan artikel skripsi sebanyak 53 artikel dan tahap kedua mengeluarkan artikel yang tidak terindeks Scopus dan Sinta sebanyak 41 artikel dan artikel berbentuk *literature review* sebanyak 1 artikel. Jumlah artikel yang memenuhi kriteria dan dimasukkan dalam SLR sebanyak 19 artikel dimana 5 terindeks Q1 dan Q4 Scopus dan 15 terindeks Sinta 2 sampai Sinta 5 dan abstrak artikel sesuai dengan yang diharapkan terkait *collaborative governance* dalam penurunan stunting.



Gambar 2. Diagram Modifikasi Prisma Penelusuran Literatur
 Keterangan gambar: CGS adalah “collaborative governance” AND stunting

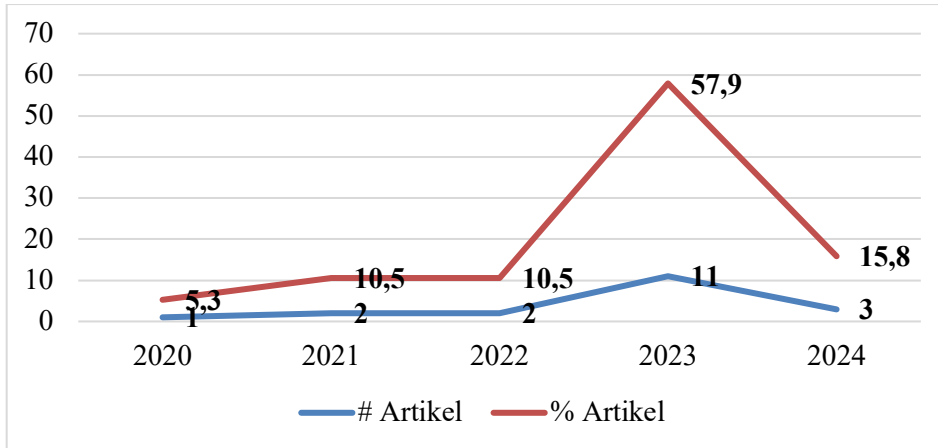
| Kriteria | Penyaringan |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Keterbatasan | Topik (Judul, Abstract, Kata Kunci) |
| Bahasa | Inggris, Indonesia |
| Area Subyek | Ilmu Sosial |
| Jenis Dokumen | Artikel |
| Tahap Publikasi | Final |
| Jenis Artikel | Studi Empiris |
| <i>Collaborative Governance</i> | Terkait Stunting |
| Kualitas | Artikel terindeks Scopus dan Sinta |

Sumber: Data Primer

4. HASIL & PEMBAHASAN

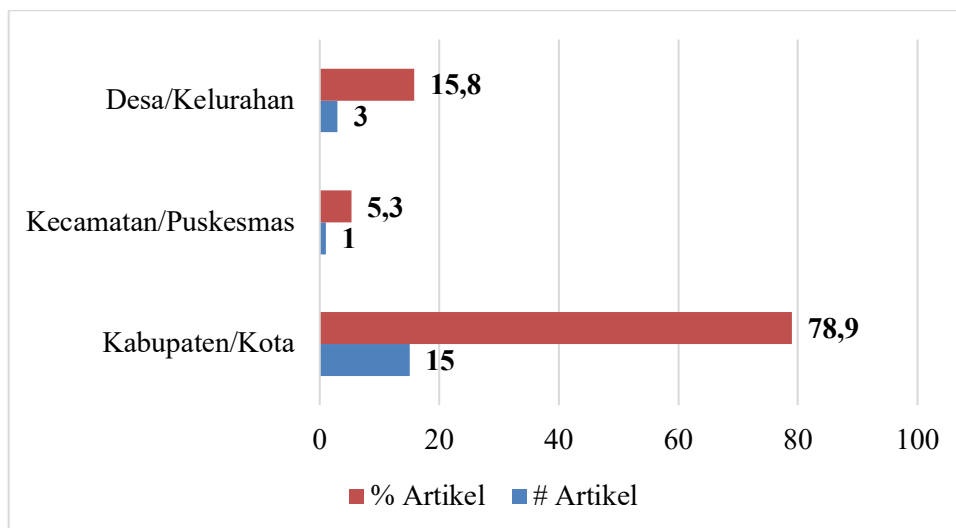
4.1 Riset *Collaborative Governance* di Indonesia

Ada 19 artikel tentang riset *collaborative governance* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan tahun terbit, kebanyakan artikel terbit di tahun 2023: 11 artikel (57,9%), disusul terbitan tahun 2024: 3 artikel (15,8%), kemudian tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing: 2 artikel (10,5%) dan yang paling sedikit tahun 2020: 1 artikel (5,3%).



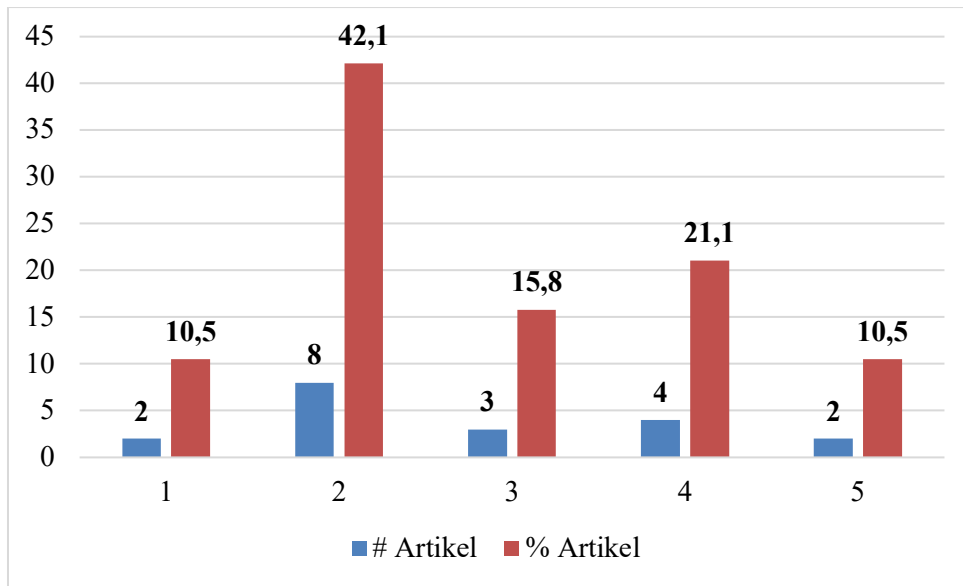
Gambar 3. Jumlah dan Persentase Artikel Berdasarkan Tahun Terbit

Dari analisis *scope* wilayah penelitian artikel sebagian besar: 15 artikel (78,9%) di tingkat kabupaten/kota, menyusul 3 artikel (15,8%) di tingkat desa/kelurahan, dan Puskesmas/kecamatan: 1 artikel (5,3%).



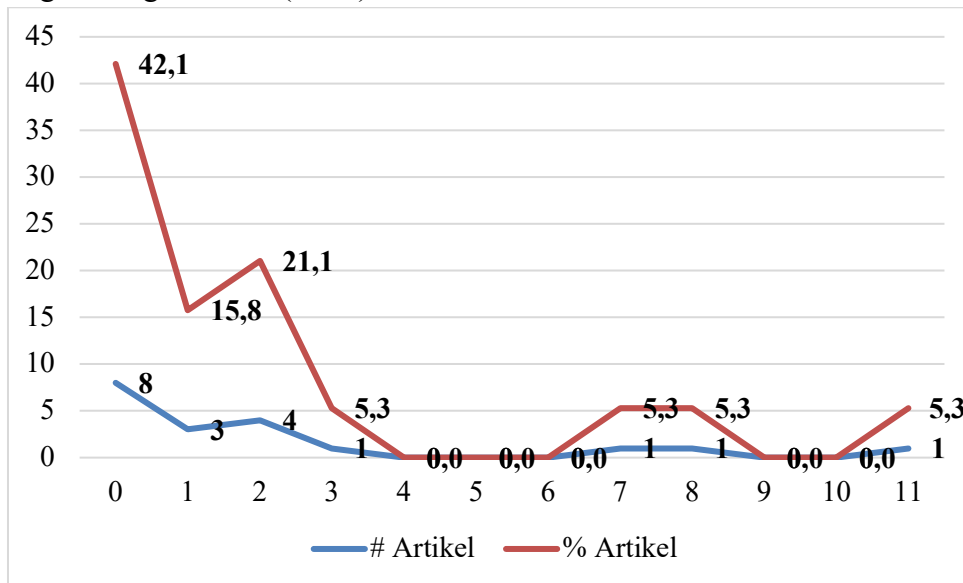
Gambar 4. Jumlah dan Persentase *Scope* Wilayah Penelitian dari Artikel

Analisis jumlah *author* (penulis) menunjukkan sebagian besar penulis artikel 2 orang: 8 artikel (42,1%), disusul penulis 4 orang: 4 artikel (21,1%), kemudian penulis 3 orang: 3 artikel (15,8%) dan terakhir penulis 2 orang dan 5 orang masing-masing: 2 artikel (10,5%).



Gambar 5. Jumlah dan Persentase *Author/s* (Penulis) Artikel

Berdasarkan analisis banyaknya sitasi artikel mayoritas artikel tidak ada (nol/0) sitasi: 8 artikel (42,1%), 2 sitasi: 4 artikel (21,1%), 1 sitasi: 3 artikel (15,8%), kemudian 7 sitasi, 8 sitasi, 11 sitasi masing-masing 1 artikel (5,3%).



Gambar 6. Jumlah dan Persentase Sitasi Artikel

4.2 Dinamika *Collaborative Governance*

Kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan dengan cukup baik, sementara di Kabupaten Pandeglang dinilai belum efektif (Candarmaweni & Rahayu, 2020; Sukanti & Faidati, 2021). Kolaborasi ini memenuhi prinsip dinamika *collaborative governance*, yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama (Sukanti & Faidati, 2021). Pemerintah Banyumas, Sleman, dan Pandeglang berupaya merumuskan dan mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan yang berkontribusi pada stunting (Candarmaweni & Rahayu, 2020; Saputra & Kurniasih, 2023; Sukanti & Faidati,

2021). Namun, dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) masih terfokus pada program masing-masing, sehingga keberhasilan program bersama sulit dipantau (Candarmaweni & Rahayu, 2020). Di Sleman, keterlibatan banyak stakeholder, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, dan Posyandu, telah terbentuk forum diskusi di tingkat kecamatan, desa, dan puskesmas, namun forum di tingkat daerah belum terbentuk (Sukanti & Faidati, 2021). Motivasi bersama dicapai melalui kesepahaman tugas dan wewenang masing-masing stakeholder, serta adanya visi, misi, dan komitmen yang sama. Kepercayaan dibangun melalui rapat monitoring, pelatihan, dan penyuluhan. Sektor swasta di Pandeglang juga terlibat aktif, memberikan dampak positif melalui penyuluhan dan pelatihan (Candarmaweni & Rahayu, 2020).

Kapasitas aksi bersama di Sleman didukung oleh peraturan yang jelas dan kepemimpinan yang baik. Informasi terkait stunting disebarkan melalui berbagai media, dan beberapa inovasi telah dilakukan dalam program penanggulangan stunting, seperti Getar Thala, Gambang Stunting, PANdu TEMan, dan Pecah Ranting (Sukanti & Faidati, 2021). Di Pandeglang, program manajemen stunting di OPD lebih fokus pada desa, namun koordinasi dan pengetahuan antara stakeholder masih perlu ditingkatkan (Candarmaweni & Rahayu, 2020). Di Banyumas, pemerintah menyediakan ruang interaksi bagi semua pihak dan menerapkan gaya kepemimpinan yang responsif dan terbuka terhadap saran (Saputra & Kurniasih, 2023). Desain kelembagaan yang kolaboratif di Banyumas dilakukan secara transparan, dengan koordinasi yang dimulai dari tingkat pemerintahan terendah hingga kabupaten (Saputra & Kurniasih, 2023). Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti sumber daya manusia dan anggaran, serta faktor penghambat seperti penolakan masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak sehat (Sukanti & Faidati, 2021).

4.3 Model *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Stunting

Analisis hubungan antar aktor di tingkat kabupaten mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengaruh terbesar dalam penanganan stunting, dengan skor matriks pengaruh langsung sebesar 151, memastikan ketersediaan fasilitas penunjang program. Sebaliknya, perguruan tinggi memiliki pengaruh terendah dan berperan sebagai pemberi masukan kebijakan di tingkat kabupaten. Kedua, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan BKKBN menunjukkan ketergantungan tinggi, dengan skor masing-masing 154, 153, dan 153, menjadikan mereka aktor kunci dalam menentukan kebijakan penanggulangan stunting. Ketiga, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Badan Keluarga Berencana memiliki konvergensi kuat, menunjukkan keselarasan kepentingan dan respons terhadap tujuan yang ditetapkan. Keempat, perguruan tinggi menunjukkan divergensi kuat karena perbedaan kepentingan dibandingkan aktor lainnya.

Kelima, ambivalensi tinggi perguruan tinggi harus menjadi pertimbangan Bappeda dalam merancang pola kerja sama. Keenam, wawancara dengan kelembagaan daerah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa peran mereka dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumedang secara keseluruhan sangat baik (Hermawan et al., 2023). Di Kabupaten Garut, analisis stakeholder menunjukkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati memiliki kepentingan dan pengaruh terbesar terhadap keberhasilan program. Perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, DPMD, Dinas PPKBP3A, dan PUPR memiliki kepentingan tinggi (kuadran II),

sementara perangkat daerah provinsi dan kabupaten lainnya berada di kuadran III (kategori sedang). Selain itu, tingkat kecamatan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan kader juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi program (Ipa et al., 2023). Model kolaborasi pentahelix di suatu kabupaten memperlihatkan hubungan kerja sama yang baik antara akademisi, bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media. Dalam kolaborasi ini, Bappeda berperan sebagai sektor utama yang mengkoordinasikan unsur-unsur pentahelix melalui rapat rutin, baik dalam skala besar maupun kecil. Kelima unsur tersebut menunjukkan kontinuitas dan stabilitas dengan menjalankan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing (Putri & Hertati, 2023).

Perkembangan riset terkait *collaborative governance* dalam penurunan stunting berkembang dalam 4 tahun terkait yaitu dari tahun 2020-2024. Sebenarnya sudah ada 40 riset yang telah dipublikasi dalam berbagai jurnal dalam dan luar negeri namun 21 artikel diantaranya tidak terindeks baik Scopus maupun Sinta. Riset meningkat pesat di tahun 2023, dua tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian *literature review* terkait *collaborative governance* yang telah dilakukan sebelumnya membahas analisis peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penurunan stunting (Sumanti, 2024).

Hasil penelitian SLR ini menunjukkan bahwa sebagian daerah ada yang sudah baik dinamika *collaborative governance* yang dijalan sementara sebagian masih kurang efektif. Hal ini sama dengan temuan diluar stunting, *collaborative governance* di program lain telah melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat, dan meskipun pelaksanaan dimensi dan proses *collaborative governance* sudah berjalan, masih terdapat tantangan dan hambatan. Program lain, seperti JakPreneur untuk digitalisasi UMKM, juga memenuhi semua dimensi teori Ansell & Gash (2008). Program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi digitalisasi UMKM tetapi juga membantu mengembangkan pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Namun, penelitian menemukan beberapa kendala, seperti potensi miskomunikasi, sosialisasi program yang tidak optimal, dan tingkat penyerapan informasi yang relatif rendah di kalangan pelaku UMKM (Katya et al., 2021).

Desentralisasi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan, terutama dalam upaya penurunan stunting. Meskipun komposit inklusivitas yang direkomendasikan oleh badan dunia dapat berpotensi kurang kontekstual dan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat, Indonesia juga dihadapkan pada ketimpangan antar daerah. Desentralisasi juga mempengaruhi daya inovasi pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Pada desentralisasi gelombang kedua, lebih banyak inovasi daerah yang muncul karena pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas dan fleksibel bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Contohnya adalah reformasi sistem kesehatan di beberapa daerah yang memungkinkan restrukturisasi organisasi, anggaran, sumber daya manusia, kolaborasi, pemberian insentif bagi inovator, serta penggunaan sistem informasi, yang semuanya berdampak pada perluasan pelayanan kesehatan dan peningkatan kepuasan masyarakat (Holzhacker et al., 2021)

Di Filipina, upaya pencegahan masalah gizi dilakukan melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan kapasitas negara dalam penelitian, pembuatan kebijakan, dan implementasi program. Pembentukan berbagai lembaga publik yang terlibat dalam penelitian dan pembuatan kebijakan menunjukkan pentingnya kemauan politik melalui undang-undang. Tugas program gizi mengalami perkembangan dari era ke era. Pada tahun

1970-an, tantangan utama adalah terbatasnya data gizi nasional, tenaga kerja, peralatan, dan infrastruktur kesehatan. Sebagai respons, lembaga publik dan swasta memperkenalkan undang-undang survei gizi nasional dan menempatkan pekerja gizi di setiap desa. Saat ini, tantangan yang dihadapi melibatkan peningkatan implementasi program kesehatan dalam konteks devolusi layanan kesehatan, serta pengumpulan bukti untuk memperkuat strategi suplementasi, fortifikasi, menyusui, dan ketahanan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, solusi dan kolaborasi multisektoral sangat penting dalam menyediakan bukti dasar untuk perumusan kebijakan. Sektor swasta, seperti Pusat Gizi Filipina, berperan sebagai mitra pendukung dalam tata kelola yang baik. Akhirnya, pelajaran yang dipetik dari beberapa dekade penerapan program gizi nasional, dengan mempertimbangkan perubahan politik dan ekonomi, dirangkum sebagai referensi bagi upaya di masa depan (Solon, 2006).

Di Senegal, para pemangku kepentingan nasional memuji stabilitas politik, rendahnya konflik skala besar, pengurangan kemiskinan yang sedang berlangsung, serta pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai faktor yang memfasilitasi perbaikan kekurangan gizi kronis pada anak-anak. Pemangku kepentingan regional sependapat, menyoroti efek positif dari pengentasan kemiskinan, pendidikan ibu, dan program lainnya, termasuk inisiatif yang dipimpin oleh donor dalam upaya penurunan stunting. Mereka juga mencatat peningkatan akses ke layanan kesehatan dan praktik kebersihan seperti mencuci tangan. Namun, praktik budaya dan kemiskinan masih menjadi hambatan dalam mencapai keragaman pola makan dan praktik menyusui eksklusif, meskipun sudah ada rekomendasi dari petugas kesehatan. Kelompok diskusi dengan ibu-ibu menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan sangat penting untuk ketahanan pangan, yang telah mengalami beberapa peningkatan. Meskipun ketersediaan makanan telah meningkat, hal ini masih bergantung pada lokasi geografis dan faktor musiman. Tantangan terkait air, sanitasi, dan kebersihan tetap menjadi masalah di tiga wilayah dan kelompok umur. Para ibu mencatat peningkatan ketersediaan pos kesehatan, dengan sebagian besar ibu telah menerima empat kali kunjungan ante natal care, melahirkan di fasilitas kesehatan, memvaksinasi anak-anak mereka, serta mendapatkan edukasi yang diberikan kepada mereka (Brar et al., 2020)

Di Nepal, faktor-faktor yang mendorong penurunan stunting meliputi stabilitas politik, peningkatan pendidikan (khususnya bagi perempuan), pemberdayaan perempuan, pengiriman uang yang memperbaiki standar hidup dan gizi, pengurangan kemiskinan, serta urbanisasi. Para pemangku kepentingan nasional menekankan pentingnya kombinasi inisiatif yang menargetkan kesehatan dan nutrisi ibu dan bayi, serta upaya yang lebih luas seperti peningkatan akses air dan sanitasi (WASH), pengurangan kemiskinan, dan pendidikan. Faktor-faktor utama yang mendukung penurunan stunting mencakup peningkatan akses layanan kesehatan di tingkat masyarakat, perbaikan ketahanan pangan dan keragaman makanan melalui perubahan praktik pertanian, serta pengurangan infeksi dan penyakit menular (Conway et al., 2020)

Di tingkat masyarakat, pemangku kepentingan seperti FCHV dan petugas kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan dari pengiriman uang dan akses layanan kesehatan dalam meningkatkan kesehatan anak. Migrasi tenaga kerja laki-laki dan peningkatan pendidikan perempuan juga berdampak langsung pada pemberdayaan perempuan, memungkinkan mereka mengambil peran kepemimpinan dalam rumah tangga dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan dan program gizi yang didukung donor serta

peningkatan fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak-anak (Conway et al., 2020).

Ibu-ibu di masyarakat menggarisbawahi pentingnya peningkatan status sosial ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dalam menurunkan stunting. Mereka mencatat bahwa ketahanan pangan, akses air dan sanitasi, serta layanan kesehatan telah meningkat, meskipun tantangan seperti keterpencilan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai masih ada. Penyebab langsung yang disebutkan meliputi peningkatan keragaman makanan, penurunan insiden penyakit menular, dan rendahnya tingkat kesuburan serta jarak antar kelahiran yang lebih lama (Conway et al., 2020).

Dalam tinjauan terhadap lembaga koordinasi gizi lintas sektoral, seperti Proyek Pertanian-Nutrisi-Keunggulan (TANA) di Mozambik, Nigeria, Uganda, dan Ghana, Benson dan rekan-rekannya mengevaluasi tiga fungsi utama kerangka kelembagaan: koordinasi lintas sektoral, advokasi untuk komitmen politik yang berkelanjutan, dan mobilisasi sumber daya (Benson et al., 2004) (Benson & R, 2004) (Benson, 2007). Evaluasi menunjukkan bahwa unit koordinasi gizi lintas sektoral di negara-negara ini kurang efektif, terutama karena kurangnya komitmen politik yang berkelanjutan, bukan karena hambatan lintas sektoral. Dengan kata lain, koordinasi lintas sektoral menjadi penting hanya jika masalah kekurangan gizi dianggap sebagai prioritas politik, yang mendorong tindakan lintas sektor (Harris & Drimie, 2012).

Pengalaman dari Afrika Selatan dan Peru menunjukkan bahwa kurangnya kemauan politik menghambat efektivitas koordinasi lintas sektoral, seperti yang terlihat dalam program INP dan IFSS di Afrika Selatan yang dianggap tidak efektif. (Benson, 2008) berpendapat bahwa pentingnya narasi kebijakan yang relevan dengan kondisi negara harus dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan. Narasi ini, menurut (Benson et al., 2004), adalah alat penting, tetapi advokasi perlu menjangkau audiens yang lebih luas di luar mereka yang langsung terlibat dalam kegiatan gizi (Harris & Drimie, 2012). Studi-studi tentang pendekatan multisektoral untuk mengatasi malnutrisi cenderung deskriptif daripada analitis, tidak secara mendalam mengkaji desain atau mekanisme operasional pendekatan ini. Dua studi kasus dari Senegal dan Kolombia menantang asumsi umum dan menawarkan panduan tentang kapan dan bagaimana bekerja secara multisektoral. Di Senegal, Program Peningkatan Gizi (NEP) berhasil menggunakan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai kementerian, donor, dan LSM, di bawah pengawasan Unit Koordinasi Pengurangan Malnutrisi yang terkait dengan Kantor Perdana Menteri (Harris & Drimie, 2012).

Kompleksitas dan sifat multisektoral dari malnutrisi memerlukan tindakan lintas sektoral yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Pelajaran penting dari tinjauan ini mencakup peran advokasi dalam meringkai masalah dalam konteks yang tepat, pentingnya organisasi pengaturan yang kredibel untuk memobilisasi sumber daya, dan membangun kapasitas strategis untuk mengelola hubungan multisektoral guna meningkatkan hasil gizi (Harris & Drimie, 2012). Model collaborative governance dengan pendekatan pentahelix (ABCGM) dianggap paling komprehensif karena melibatkan lima aktor yang saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Meskipun masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda, mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, meskipun model pentahelix sudah mulai diterapkan di Indonesia, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pemerintah perlu mengambil peran lebih besar, tidak hanya sebagai pembuat

kebijakan, tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator dalam upaya mencegah dan mengurangi stunting (Sumanti, 2024).

Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur penanganan stunting, sehingga pemerintah daerah dapat mengejar program inovatif melalui kolaborasi berbagai pihak. Namun, banyak pihak dengan visi mengatasi stunting belum terlibat dan cenderung bergerak sendiri, menyebabkan upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif, efisien, dan terintegrasi. Oleh karena itu wadah aksi konvergensi yang sudah berjalan di hampir semua daerah dapat menjadi wadah alternatif dalam pelibatan pentahelix. Untuk itu diperlukan upaya meliputi evaluasi peran pemangku kepentingan, memperluas kerja sama jaringan, mengembangkan strategi inovatif dalam pelaksanaan program, dan membangun saluran komunikasi khusus mengenai stunting di wilayah kabupaten (Permatasari & Walinegoro, 2023).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian SLR yang dilakukan digunakan 19 artikel tentang “*Collaborative governance*” AND stunting yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Artikel dipublikasikan antara tahun 2020-2024. *Scope* penelitian dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Jumlah penulis artikel antara 1-5 orang. Berdasarkan telaah 19 artikel tersebut diketahui bahwa dinamika dan proses *collaborative governance* dalam pencegahan stunting ada yang sudah berjalan dengan baik namun ada yang belum efektif. Demikian halnya dengan model *collaborative governance* ada yang sudah melibatkan unsur pentahelix (ABCGM: *Academic, Business, Community, Government, and Media*), namun ada yang masih didominasi oleh pemerintah. Secara umum pihak non-pemerintah masih perlu didorong dan diberi kapasitas agar semakin terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengambilan keputusan.

Terkait pelaksanaan aksi konvergensi ada daerah yang sudah melibatkan pentahelix di dalam prosesnya dan telah mendapat manfaatnya yaitu penurunan prevalensi stunting. Namun demikian ada daerah yang masih mengalami kendala untuk melibatkan sektor non-pemerintah sehingga memerlukan kepemimpinan yang dapat melibatkan, menguatkan kapasitas pemangku kepentingan non-pemerintah agar dapat lebih berperan dalam aksi konvergensi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia, diperlukan *collaborative governance* yang efektif dan efisien. Dinamika dan proses *collaborative governance* diantara semua aktor ABCGM yang baik terbukti menurunkan prevalensi stunting di beberapa daerah. Hal ini tentu memerlukan peran kepemimpinan yang fasilitatif dan komitmen daerah yang kuat. Untuk itu diperlukan berbagi *best practices collaborative governance* untuk meningkatkan kapasitas daerah lain untuk melakukan *collaborative governance* di daerahnya. Pemerintah pusat perlu mendorong agar semua pemerintah daerah secara resmi melibatkan ABCGM dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Hal tersebut tentu akan berharap jika aktor non-pemerintah juga proaktif untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah serta terlibat dalam forum komunikasi percepatan penurunan stunting yang ada.

6. REFERENSI

- Abidin, K. Z., Soegiarto, A., Masyarakat, H., & Jakarta, U. N. (2021). Pemanfaatan Instagram sebagai Media Publikasi Media Online yang Dapat Digunakan oleh Penggunanya dengan Berbagai Aktivitas Seperti Joining, Sharing, dan atau Isi dari Media Sosial Mereka pada Dianggap sebagai Media Online yang Dapat Mengubah Komunikasi. *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 12(No. 2).
- Absor, U., & Ratriana, K. (2024). Enhancing Stunting Reduction Through Collaborative Governance: Concepts and Implementation in Brebes Regency. *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 9(No.1).
- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Setiyono, B., Novira, A., & Sutiyono, W. (2024). Self-organizing Volunteers as a Grassroot Social Innovation: The Contribution and Barrier to Empowerment and Collaborative Governance in Stunting Intervention. *Development Studies Research*, 11(1).
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative Governance in A Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Aida, A. N. (2019). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Kejadian Stunting di Indonesia (Vol. 4, Issue 2).
- Andayani, Q., Ariadi, S., Koesbardiati, T., Fauziah, N., & Praharsena, B. (2022). Penta-helix “Desa Emas” as a Commitment to Accelerate Stunting Reduction in Sumenep Regency, East Java Province. *National Nutrition Journal / Media Gizi Indonesia; 2022 Special Issue*, Vol. 17, P64-75, 12p.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antaraneews. (2019). Sembilan Organisasi Deklarasi “Gerakan NGO Indonesia Peduli Stunting.” <https://www.antaraneews.com/berita/817527/sembilan-organisasi-deklarasi-gerakan-ngo-indonesia-peduli-stunting>
- Asmara, C. (2023). Indonesia Reports Lowest Stunting Rate since At Least 2000.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik (Tim DAP Press, Ed.; cetakan pertama).
- Awaluddin, M., Sule, E., & Kaltum, U. (2016). The Influence of Competitive Forces and Value Creation on Company Reputation and Competitive Strategy: A Case of Digital Creative Industry in Indonesia with The Implication on Sustainable Business Performance. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. 4(Issue 2), 201–234.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. In *Maternal and Child Nutrition* (Vol. 14, Issue 4). <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Benson, T. (2007). Cross-Sectoral Coordination Failure: How Significant a Constraint in National Efforts to Tackle Malnutrition in Africa? *Food and Nutrition Bulletin* 28 (Supplement 2): S323–S330., Vol. 28(Supplement), S323–S330.
- Benson, T. (2008). Improving Nutrition as a Development Priority: Addressing Undernutrition in National Policy Processes in Sub-Saharan Africa.
- Benson, T., Palmer, T., & Johnson-Welch, C. (2004). Crossing Boundaries to Reduce Malnutrition? An Institutional Study of Agriculture and Nutrition in Uganda, Mozambique, and Nigeria.

- Benson, T., & R, Satcher. (2004). Crossing Boundaries to Reduce Malnutrition? An Institutional Study of Agriculture and Nutrition in Ghana.
- BKKBN. (2021a). Penanganan Stunting Perlu Kerjasama Lintas Kementerian Lembaga dan Daerah. <https://www.bkkbn.go.id/berita-penanganan-stunting-perlu-kerjasama-lintas-kementerian-lembaga-dan-daerah>.
- BKKBN. (2021b). Penguatan Peran Serta Mitra Kerja dan Stakeholder untuk Atasi Stunting. <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1498/penguatan-peran-serta-mitra-kerja-dan-stakeholder-untuk-atasi-stunting>.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries. In *The Lancet* (Vol. 382, Issue 9890). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Brar, S., Akseer, N., Sall, M., Conway, K., Diouf, I., Everett, K., Islam, M., Sène, P. I. S., Tasic, H., Wigle, J., & Bhutta, Z. (2020). Drivers of Stunting Reduction in Senegal: A Country Case Study. *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 112(Supplement 2), 860S-874S.
- Brereton, P., Kitchenham, B. A., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from Applying the Systematic Literature Review Process within The Software Engineering Domain. *Journal of Systems and Software*, 80(4). <https://doi.org/10.1016/j.jss.2006.07.009>
- Candarmaweni, & Rahayu, A. Y. S. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, 211. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>
- Conway, K., Akseer, N., Subedi, R. K., Brar, S., Bhattarai, B., Dhungana, R. R., Islam, M., Mainali, A., Pradhan, N., Tasic, H., Thakur, D. N., Wigle, J., Maskey, M., & Bhutta, Z. A. (2020). Drivers of Stunting Reduction in Nepal: A Country Case Study. *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 112(Supplement 2), 844S-859S.
- Edufarmers. (2023). Soft Launching of Santosa Program for Indonesia Children: Encourage Multi-Stakeholder Collaboration Towards Zero Stunting Indonesia. <https://www.edufarmers.org/soft-launching-of-santosa-program-for-indonesia-children-encourage-multi-stakeholder-collaboration-towards-zero-stunting-indonesia>.
- Febriana, N., & Hertati, D. (2023). Penanggulangan Stunting dalam Prespektif Collaborative Governance. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol. 4(No. 2).
- Fernandes, D., Daud Niga, J., & Seran Klau, R. (2022). Collaborative Governance in The Handling of Stunting Program in East Flores District. <http://devotion.greenvest.co.id>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, Vol. 3(No. 1), 32–40.
- Fransen, L. (2015). The Politics of Meta-Governance in Transnational Private Sustainability Governance. *JSTOR*, Vol. 48(No.3), 293–317.
- Gani, A. A. (2020). Studi Operasional Penurunan Stunting melalui Upaya Konvergensi di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
- Gani, A. A., Hadju, V., Syahrudin, A. N., Otuluwa, A. S., Palutturi, S., & Thaha, A. R. (2021). The Effect of Convergent Action on Reducing Stunting Prevalence in Under-Five Children in Banggai District, Central Sulawesi, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S421–S424. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.066>

- Halibas, A., Ocier Sibayan, R., & Lyn Maata, R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 159–174.
- Harris, J., & Drimie, S. (2012). Toward an Integrated Approach for Addressing Malnutrition in Zambia.
- Herlianti, L. (2022). Collaboration of Actors in The Networks in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District. In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 12, Issue 2).
- Hermawan, M. F., Yudha, E. P., Kusno, K., & Nugraha, A. (2023). Konvergensi Aktor Kelembagaan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Sumedang. In *Januari* (Vol. 2023, Issue 1).
- Hertati, D., Nurhadi, & Tukiman. (2023). Penta Helix Collaboration Model in Handling Problems of Waste Management. *7st International Seminar of Research Month 2022. NST Proceedings*, 371–377.
- Holzhaecker, R. L., Wittek, R., & Woltjer, J. (2021). Decentralization and Governance in Indonesia. *Jurnal Wacana Kerja*, Vol. 24(No. 2).
- IAP2 Indonesia. (2023). Cerita Partisipasi: Attack on Stunting. <https://iap2.or.id/Cerita-Partisipasi-Attack-on-Stunting/>.
- Ibrahim, I. A., Faramita, R., Gizi, B., Ilmu, F., Uin, K., & Makassar, A. (2015). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar Tahun 2014.
- Ipa, M., Astuti, E. P., Ridwan, W., Yuliasih, Y., & Laksono, A. D. (2023). Stakeholders' Role in The Implementation of Stunting Management Policies in Garut Regency. *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administra Kesehatan Indonesia)*, Vol. 11(No.1).
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *18(3)*, 2021–2383. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Jordan, A., Wurzel, R. K. W., & Zito, A. (2005). The Rise of 'New' Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government. *Political Studies*, Volume 53(Issue 3), 477–496.
- Jufri, Usman, B., & Nofriadi. (2023). Collaborative Governance antara Dinas Kesehatan Dengan DP3AP2KB dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 8(No. 3).
- Katya, A. S., Mayasari, I., & Haryati, D. (2021). Analisis Collaborative Governance dalam Percepatan Digitalisasi UMKM di Provinsi DKI Jakarta pada Masa Pandemi Covid-19. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*.
- Kemendes RI. (2022, December 14). Intervensi Pencegahan Stunting Dimulai Sebelum dan Saat Kehamilan.
- Kemendagri PMK. (2022). Penanganan Stunting Tak Cukup dengan Intervensi Gizi.
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Literature Reviews. *Joint Technical Report*, Keele University TR/SE-0401 and NICTA TR-0400011T.1, 33(2004).
- Kitchenham, B. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. In *Icse* (Issue January 2007).
- Kitchenham, B., Brereton, P., Li, Z., Budgen, D., & Burn, A. (2004). Repeatability of Systematic Literature Reviews. *IET Seminar Digest*, 2011(1). <https://doi.org/10.1049/ic.2011.0006>

- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2020). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Gizi Sensitif di Kota Semarang. [Http: Www.Fisip.Undip.Ac.Id](http://www.fisip.undip.ac.id).
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Amaliah, N., & Wisnuwardani, R. W. (2022). Stunting among Children Under Two Years in Indonesia: Does Maternal Education Matter? *PLoS ONE*, 17(7 July). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271509>
- Lian, B. (2019). Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.
- Nutrition for Growth. (2023). Reducing Stunting in Indonesia through District Level Commitments.
- O'Brien, M. (2012). Review of Collaborative Governance: Factor Crucial to the Internal Workings of the Collaborative Process. The Ministry for The Environment.
- Palupi, F. D., Hapsari, I., Fajar, I., Hakimah, N., Tapriadi, T., Hadisuyitno, J., & Nadhiroh, S. R. (2022). Study of Readiness for Implementation of Integrated Stunting Reduction Interventions in Klojen Sub-District, Malang City. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 230–238. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.230-238>
- Pangkey, M. S., Danga Pombengi, J., Posumah, J. H., & Mambo, R. (2022). Collaborative Governance in Stunting Management in Bolaang Mongondow District. In *International Journal of Innovative Science and Research Technology* (Vol. 7, Issue 11). www.ijisrt.com
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021).
- Permatasari, A., & Walinegoro, B. G. (2023). Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Smart Society sebagai Upaya Berkelanjutan Penurunan Stunting. *The Journal Publishing*, Vol. 4(No. 6).
- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic Mapping Studies in Software Engineering. In *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, Vol. 17, No. 1, 2008.
- Plattner, M. F. (2013). Reflections on Governance. *Journal of Democracy*, 24(4), 17–28.
- Pratama, A. Y., Andri, S., Yuliani, F., & As'ari, H. (2024). Collaborative Governance Strategies to Accelerate Stunting Handling in Kampar District. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4).
- Putri, A. A., & Hertati, D. (2023a). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, Vol. 5(No. 3).
- Rahmatunnisa, M. (2011). Analisa Kritis atas Good Governance. Program Studi Pemerintah Dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Ready, A., & Romyeni. (2016). Penggunaan Media Online sebagai Sumber Informasi. *Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3(No. 1).
- Rizal, R. P., Damayanti, D. N., Debriyanti, N. C., & Sari, W. P. (2022). Research Trends in English Language Education from Ontological Perspective: A Systematic Review. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jelc.v12i2.3114>
- Rosha, B. C., Sari, K., SP, I. Y., Amaliah, N., & Utami, N. H. (2016). Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita di Kota Bogor. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2). <https://doi.org/10.22435/bpk.v44i2.5456.127-138>
- RPJMN, 2020-2024. (2020). Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

File:///C:/Users/User/Downloads/Perpres%20Nomor%2018%20Tahun%202020%20-%20Lamp.%20II.Pdf.

- Sabilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Implementation of the Principles of Good Governance in Combating Stunting in the Jabon District, Sidoarjo Regency. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 19(No. 1), 53–67.
- Saputra, A. S., & Kurniasih, D. (2023). Collaborative Governance in Stunting Reduction: A Case Study in Banyumas District. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 14(No. 1).
- Setwapres. (2021). Peran Wakil Presiden dan Kantor Sekretariat Wakil Presiden Dalam Percepatan Pencegahan Stunting.
- Siswati, T., Iskandar, S., Pramestuti, N., Raharjo, J., Rubaya, A. K., & Wiratama, B. S. (2022). Drivers of Stunting Reduction in Yogyakarta, Indonesia: A Case Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph192416497>
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. L. (2017). Strategi Pengembangan UKM Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 16(No. 2), 136.
- Solon, F. S. (2006). Good Governance for Nutrition in the Philippines: Elements, Experiences, and Lessons Learned. *Food and Nutrition Bulletin*, Vol. 27(Issue 4).
- Sukanti, & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman.
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26.
- Sutikno, C., & Naufal, A. (2023). Proses Collaborative Governance Penanggulangan Stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12(No. 04), 101–111.
- Syamsuadi, A., Febriani, A., Ermayani, E., Bunyamin, B., & Nursyiamah, N. (2023). Peran Lintas Sektor dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*.
- Tanoto Foundation. (2020, June 29). What is Stunting and Why It Matters.
- Torlesse, H., Cronin, A. A., Sebayang, S. K., & Nandy, R. (2016). Determinants of stunting in Indonesian children: Evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. *BMC Public Health*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3339-8>
- Utomo, H. S., Khaerani, T. R., & Anzalna, Y. (2023). Cross-Sector Collaboration in Intervention to Prevent and Reduce Stunting in Penajam Paser Utara District. *Journal of Etika Demokrasi (JED)*, Vol. 8(Number 23), 234–244.
- Wandini, K., & Angesti, A. N. (2023). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi Gizi Pada Remaja SMA di Ruang Lingkup RSDH, Desa Cipenjo, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, Vol. 5(No. 1), 15–21.
- Web Terpadu. (2022). Bappeda Ajak Semua Stakeholder Berjuang Atasi Stunting Hingga Nol Persen. <https://Tangerangkab.Go.Id/Detail-Konten/Show-Berita/5249>.
- WHO. (2013). Childhood Stunting: Challenges and opportunities.
- Widyowati, R., & Utomo, I. H. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 278–296.

- Winarno, W. W., Purwanti, A., Kristiana, D. R., & Wahyuni, E. S. (2023). Penelitian Kualitatif Menggunakan Systematic Literature Review.
- Woodhouse, N. (2021, April 11). 'I Thought She was Getting Enough Food': Indonesia's Fight against Stunting and Malnutrition.
- World Bank. (2020). Spending Better to Reduce Stunting in Indonesia: Findings from A Public Expenditure Review.
- World Bank. (2022, December 19). Reducing Child Stunting: An Investment in The Future of Indonesia.